

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi ASEAN telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Dampak globalisasi yang dapat dirasakan adalah keterbukaan dalam berbagai bidang, tak terkecuali di bidang bisnis yang dikenal dengan era pasar bebas atau liberalisasi perdagangan. Perkembangan teknologi dan pola kegiatan ekonomi yang pesat menjadikan masyarakat di dunia menjadi saling bersentuhan, membutuhkan, dan menentukan nasib satu dengan yang lain, namun saling bersaing (Shara & Khoirudin, 2024).

Setiap negara memiliki tingkat pembangunan yang berbeda-beda, terdapat salah satu teori ekonomi pembangunan yakni teori Tabungan dan Investasi oleh Harrod Domar. Menurut Harrod Domar, mendapatkan kesimpulan bahwa tingginya tabungan dan investasi dapat menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Septiani, 2022).

Pentingnya investasi dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu pernyataan yang berdasarkan pada kesenjangan data empiris atau fenomena krisis aktual di negara tersebut. Investasi swasta memainkan peranan penting dalam proses pertumbuhan dalam mengembangkan perekonomian. Melalui Investasi swasta, arus modal yang digunakan untuk perbaikan usaha dan membangun usaha yang baru dapat meningkatkan kesempatan kerja, mendukung proses produksi, transfer teknologi, akses pasar internasional melalui produk-produk ekspor, serta pengendalian mutu. Kegiatan produksi itulah yang akan memberi manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan bagi negara. Begitu pentingnya investasi bagi

suatu negara maka berdasar hal tersebut sehingga setiap negara berusaha untuk menjaga persediaan investasinya jangan sampai mengalami kekurangan (Fitrianti, 2023).

Negara-negara ASEAN sebagian besar merupakan negara yang masih dalam proses pembangunan menuju perekonomian yang modern. Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menggerakkan sektor swasta dan pembukaan lapangan pekerjaan pada masing-masing Negara ASEAN, dengan menghilangkan hambatan-hambatan agar dapat berada di posisi terdepan dalam kemajuan dan globalisasi (Fitrianti *et al*, 2015).

Penelitian ini memfokuskan analisis pada lima negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, berdasarkan pertimbangan strategis yang memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis yang relevan. Aspek geografis menjadi pertimbangan utama mengingat kelima negara ini terletak dalam kawasan regional yang sama dengan karakteristik geo-ekonomi yang saling terkait. Kedekatan geografis ini menciptakan interdependensi ekonomi yang tercermin dalam pola perdagangan, investasi, dan aliran modal intra-regional. Sebagai sebuah kawasan ekonomi terpadu, ASEAN telah mengembangkan berbagai mekanisme kerja sama ekonomi yang menghasilkan konvergensi kebijakan di berbagai sektor.

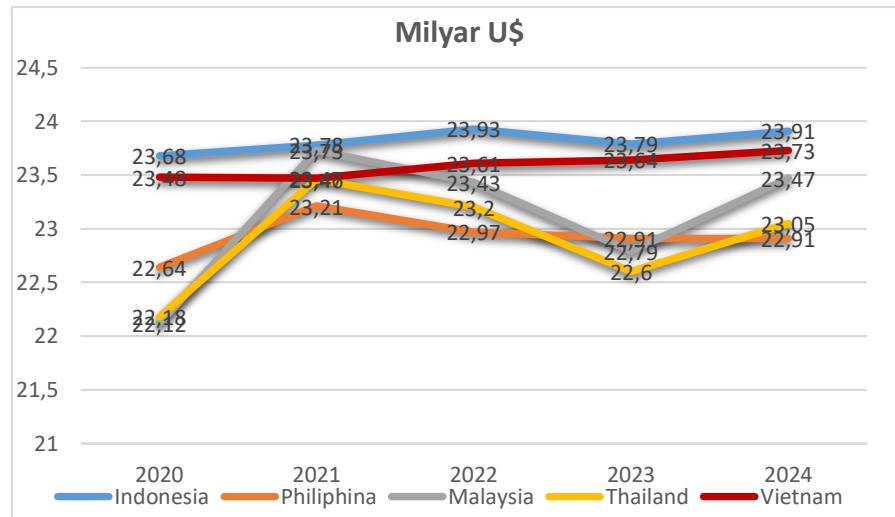
Kelima negara ini secara kolektif menyerap 85% dari total aliran FDI ke kawasan ASEAN (ASEAN Investment Report, 2023), sekaligus merepresentasikan spektrum pembangunan ekonomi yang komprehensif. Vietnam menonjol sebagai penerima FDI dengan pertumbuhan tercepat di kawasan ASEAN, Indonesia dan

Thailand menunjukkan ketahanan sebagai ekonomi matang yang terdiversifikasi, sementara Malaysia dan Filipina masing-masing unggul dalam investasi teknologi tinggi dan ekonomi berbasis jasa.

Di sisi lain, perkembangan investasi di ASEAN, khususnya pada lima negara menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif sama. Meskipun terdapat variasi dalam jumlah dan sektor investasi, keseluruhan tren investasi di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menunjukkan kecenderungan yang sama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi asing langsung (FDI) memiliki peranan penting dalam perekonomian negara-negara tersebut, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, teknologi, infrastruktur, dan jasa (Wang *et al*, 2024). Peneliti hanya memilih lima negara di ASEAN dikarenakan ketersediaan data dari 4 negara di ASEAN terbatas sehingga peneliti hanya mampu meneliti 5 negara asean yaitu indonesia, Philipina,malaysia,Thailand dan Vietnam.

UNCTAD melakukan survei tentang tren kenaikan aliran FDI di wilayah ASEAN dan menyimpulkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara telah membuat perubahan kebijakan yang menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Sebagai contoh, Indonesia telah menerapkan kebijakan peringanan pajak pendapatan selama 15 tahun untuk perusahaan asing yang melakukan investasi di daerah tertentu. Malaysia memberikan kemudahan perizinan pada perusahaan asing apabila menyalurkan modalnya 100% di pada sektor jasa keuangan dan venture capital. Thailand juga telah menambah insentif baru dalam proyek farmasi. Perusahaan Daewoo Bus Corporation telah membangun fasilitas produksi di Vietnam, dan Intel berencana untuk melakukan investasi di fasilitas semi konduktor pertamanya di

negara tersebut (Fajar & Rudatin 2023). Berikut ini adalah data Foreign Direct Investment (FDI) di Negara, Indonesia, Philipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

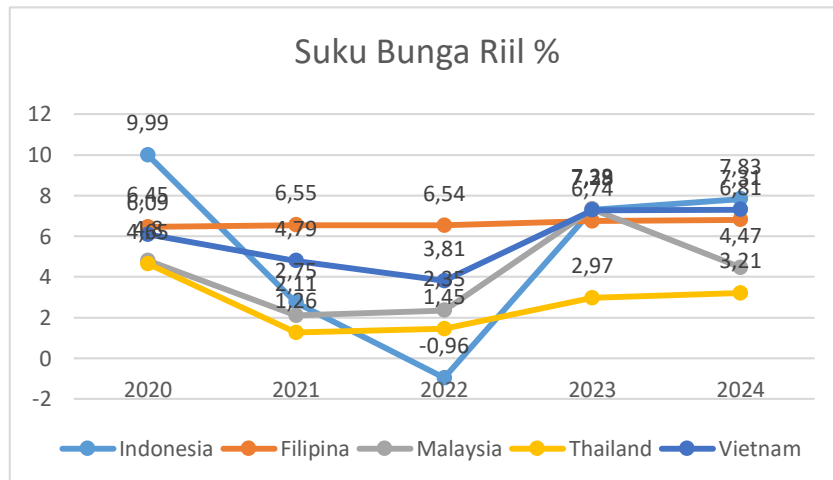


Sumber; World Bank, 2025

Gambar 1. 1 Data Foreign Direct Investment Negara ASEAN 5 (Milyar U\$)

Gambar 1.1 menunjukkan, lima negara di kawasan ASEAN mengalami perubahan dalam jumlah aliran FDI yang masuk ke lima negara selama periode 2020 hingga 2024. Selama periode tersebut Indonesia mencatatkan jumlah FDI tertinggi di antara lima negara lainnya, sebaliknya Thailand mencatatkan FDI terendah dibandingkan Lima negara lainnya. Di sisi lain, Filipina, Malaysia dan Vietnam menunjukkan tren kenaikan yang relatif stabil dari kelima negara ASEAN. Namun di tahun 2020 FDI ke lima negara ASEAN mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya yang disebabkan terjadinya Covid-19, kemudian di tahun 2021-2024 perlahan-lahan Aliran FDI yang masuk di Lima negara ASEAN terus mengalami peningkatan (Unctad, 2024).

Negara-negara dengan kebijakan yang lebih terbuka dan tingkat korupsi yang lebih rendah cenderung menarik lebih banyak investasi asing. Faktor pertama yang mempengaruhi FDI yaitu suku bunga. Suku bunga menjadi indikator yang penting dalam mempengaruhi foreign direct investment (Deviani, 2024). Berdasarkan Teori Keynesian, ketika permintaan dan juga penawaran mengalami penurunan maka tentunya akan meningkatkan suku bunga yang ada. Ketika suku bunga meningkat tentunya ada peningkatan biaya modal yang dimana menyebabkan investasi menurun.



Sumber: World Bank, 2025

Gambar 1. 2 Data Suku Bunga Negara ASEAN 5 (%)

Pergerakan suku bunga di lima negara ASEAN sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan variasi respons kebijakan moneter terhadap dinamika tantangan ekonomi global maupun domestik. Pada tahun 2020, mayoritas negara melakukan penurunan suku bunga sebagai instrumen stimulus untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Indonesia dan Filipina cenderung mempertahankan tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi guna menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Sebaliknya, Malaysia dan Thailand

menerapkan pemangkasan suku bunga secara lebih agresif, sedangkan Vietnam memilih mempertahankan stabilitas suku bunga untuk menopang kinerja ekspor.

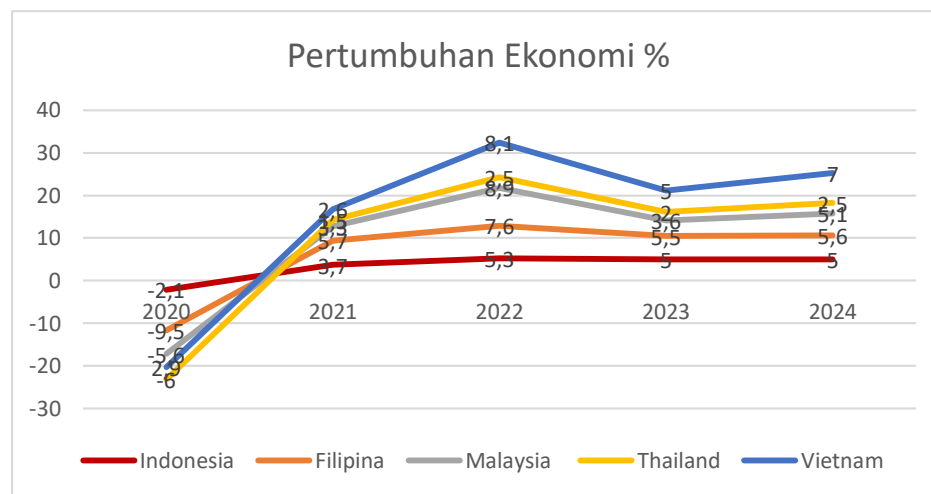
Pada periode 2021-2022 kebijakan moneter di sebagian besar negara masih bersifat akomodatif dengan mempertahankan suku bunga pada level rendah. Filipina menjadi pengecualian dengan menahan tingkat suku bunga pada posisi stabil. Indonesia bahkan sempat mencatatkan suku bunga riil negatif pada tahun 2022 sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Memasuki 2023–2024 kebijakan berbalik dengan adanya kecenderungan pengetatan moneter. Indonesia, Malaysia, dan Vietnam secara signifikan menaikkan tingkat suku bunga sebagai langkah pengendalian inflasi serta stabilisasi nilai tukar. Di sisi lain, Thailand tetap mempertahankan tingkat suku bunga rendah, sejalan dengan masih lemahnya laju pertumbuhan ekonominya.

Hasil penelitian yang dikaji oleh (Pratama & Aminda 2021) kajian ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap foreign direct investment. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis dan konsep teori. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Kristianto et al. 2024) menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap investasi di lima Negara ASEAN, yang dimana juga menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang tinggi tidak mempengaruhi foreign direct investment.

Faktor kedua yang mempengaruhi FDI dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi merupakan bagian dari pendapatan dalam suatu

perekonomian. Perekonomian dapat tetap tumbuh harus ada investasi. Investasi merupakan tambahan bersih dalam persediaan modal atau dapat menginvestasikan bagian tertentu dari Pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan tambahan bersih dalam persediaan modal. Semakin investasi meningkat dan semakin banyak maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat dengan laju pertumbuhan yang cepat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan terutama ketika menganalisis hasil dari proses pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ketika lebih banyak barang dan jasa diproduksi daripada tahun sebelumnya, maka ekonomi dikatakan tumbuh. Dengan menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan manusia dari waktu ke waktu, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengkarakterisasi seberapa baik kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah (Febryani 2017).



Sumber; Wold Bank, 2025

Gambar 1. 3 Data Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN 5 (%)

Pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang berbeda akibat kombinasi faktor domestik dan eksternal.

Tahun 2020 menjadi masa terburuk, ketika pandemi COVID-19 menekan hampir semua negara, kecuali Vietnam yang masih mampu mencatat pertumbuhan positif 2,9 persen berkat keberhasilan menekan penyebaran virus dan dukungan ekspor manufaktur. Sebaliknya, Filipina mengalami kontraksi terdalam sebesar -9,5 persen karena ketergantungan pada remitansi dan jasa, sementara Thailand terpukul -6 persen akibat runtuhnya pariwisata internasional.

Masa pemulihan mulai terasa pada 2021-2022 dengan peran stimulus fiskal, pemulihan perdagangan global, dan peningkatan arus investasi. Indonesia bangkit melalui dorongan konsumsi domestik dan ekspor komoditas, Filipina mulai pulih berkat remitansi serta masuknya kembali investasi asing, sedangkan Malaysia mencatat lonjakan pertumbuhan hingga 8,9 persen pada 2022 karena permintaan tinggi atas semikonduktor dan minyak sawit. Thailand tetap tertahan dengan pertumbuhan rendah akibat lambatnya kebangkitan sektor wisata, sementara Vietnam mempertahankan kinerja unggul melalui ekspor industri manufaktur.

Tahun 2023-2024 tren pertumbuhan relatif stabil namun cenderung melambat akibat tekanan inflasi global, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia. Thailand masih menjadi negara dengan pertumbuhan paling rendah, hanya sekitar 2-2,5 persen, sedangkan Vietnam terus menjadi motor utama kawasan dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 7 persen pada 2024 berkat kuatnya arus Foreign Direct Investment (FDI) dan keunggulan ekspor. Secara keseluruhan, pola ini mencerminkan kerentanan ASEAN-5 terhadap guncangan global, sekaligus menegaskan pentingnya diversifikasi sektor dan ketahanan struktural untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan.

Penelitian (Anwar, 2016) menemukan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap FDI, akibatnya setiap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan peningkatan yang sesuai dalam FDI. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dikaji (Ghazalian 2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap arus FDI, terutama di negara berkembang. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Heang *et al.* 2013) dalam *The Relationship between Gross Domestic Product and Foreign Direct Investment: The Case of Cambodia* yang menunjukkan bahwa GDP berpengaruh terhadap FDI dalam jangka panjang.

Faktor ketiga yang mempengaruhi FDI dalam penelitian ini adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah yang masih menjadi isu hangat global yang tidak akan pernah selesai. Korupsi dianggap sebagai suatu tantangan utama dalam mencapai tujuan utama di setiap negara yaitu mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran bagi 40 persen orang termiskin di negara-negara berkembang. Setiap negara berusaha untuk memberantas korupsi karena dampaknya sangatlah mempengaruhi perekonomian dan juga pertumbuhannya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa korupsi banyak terjadi pada negara yang memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter yaitu di negara-negara miskin dan juga negara sedang berkembang (Sasana, 2004). serta ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi (Yolanda & Satrianto, 2019).

Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya studi empiris yang menunjukkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi yang dapat menurunkan produktivitas belanja

publik, mendistorsi alokasi sumber daya yang kemudian berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan berujung terjadinya peningkatan kemiskinan (Lutfi *et al*, 2020). Mauro 1995 Rendahnya indeks persepsi korupsi di lima negara ASEAN menunjukkan bahwa kasus korupsi masih marak terjadi di negara-negara tersebut setiap tahunnya. Itu akan menjadi mengkhawatirkan bila tidak ada kebijakan penanggulangan mengenai permasalahan korupsi. Korupsi yang parah secara signifikan akan membawa pengaruh terhadap kondisi perekonomian dengan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Ichvani & Sasana 2019).

Tabel 1. 1 Data Corruption Perception Index

Tahun	<i>Corruption Perception Index</i>				
	Indonesia	Filipina	Malaysia	Thailand	Vietnam
2020	37	34	51	36	36
2021	38	33	48	35	39
2022	34	33	47	36	42
2023	34	34	50	35	41
2024	37	33	50	34	40

Sumber : Transparency International, 2025

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan skor Corruption Perception Index di negara ASEAN, Malaysia menjadi negara yang paling rendah korupsinya dari 5 negara, hal tersebut ditandai dengan skor tergolong tinggi dengan rata-rata di angka 50 yang menunjukkan korupsi semakin rendah. Selanjutnya disusul oleh negara indonesia, filipina, thailand dan vietnam yang memiliki skor di bawah 50 adalah negara yang menunjukkan bahwa korupsi cukup aktif dengan skor yang cukup rendah mendekati 0 – angka yang menunjukkan korupsi semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dikaji oleh (M. C. Purnama 2022) menemukan bahwa indeks persepsi korupsi berpengaruh terhadap FDI. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dikaji oleh (Wilantari *et al*, 2020) menemukan bahwa

Corruption Perception Index berpengaruh terhadap FDI. Hal ini sejalan dengan teori bahwa semakin tinggi nilai indeks persepsi korupsi suatu negara, maka akan meningkatkan aliran FDI yang masuk ke negara tersebut.

Penelitian terkait determinan Foreign Direct Investment (FDI) di kawasan ASEAN pada umumnya masih terbatas pada cakupan regional yang luas atau berfokus pada satu negara tertentu, serta jarang mengombinasikan variabel makroekonomi dan institusional dalam satu kerangka analisis. sebagian besar penelitian yang ada menggunakan data sebelum pandemi COVID-19 sehingga belum merepresentasikan perubahan pola FDI yang dipengaruhi oleh guncangan global, penyesuaian kebijakan moneter dan dinamika pemulihan ekonomi pascapandemi. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengaruh suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan korupsi terhadap FDI di ASEAN 5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) menggunakan data deret waktu periode 2007–2024. Integrasi variabel ekonomi dan institusional dalam analisis komparatif antar negara diharapkan menghasilkan temuan empiris yang komprehensif dan relevan sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik FDI melalui penguatan stabilitas moneter, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Determinan Foreign Direct Investment di Negara ASEAN 5”** (Indonesia, Philipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di Negara ASEAN 5.
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara ASEAN 5.
3. Apakah Korupsi berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara ASEAN 5.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Suku bunga terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara ASEAN 5.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara ASEAN 5.
3. Untuk mengetahui pengaruh Korupsi terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara ASEAN 5.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Umum

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam melengkapi kajian tentang Determinan *Foreign Direct Investment* di Negara ASEAN 5 (Indonesia, Philipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam).

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai Analisis Determinan *Foreign Direct Investment* di Negara ASEAN 5 (Indonesia,

Philiphina, Malaysia, Thailand dan Vietnam) dan menjadi acuan untuk penelitian empiris penelitian berikutnya.

3. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi sumber daya terkait Determinan *Foreign Direct Investment* di Negara ASEAN 5 (Indonesia, Philiphina, Malaysia, Thailand dan Vietnam).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Investasi

Teori Keynes atau Keynesianisme adalah suatu teori ekonomi makro yang dikembangkan oleh John Maynard. Teori ini mengusulkan bahwa pemerintah dapat memainkan peran aktif dalam mengatasi masalah ekonomi melalui investasi fiskal, yaitu pengeluaran dan pendapatan pemerintah (Hadijah, 2021).

Teori Keynes adalah teori yang mempromosikan tentang suatu perekonomian campuran yang dimana sektor swasta dan negara memegang peran yang penting. Teori Keynes dipakai sebagai acuan dalam investasi dan banyak dipakai dibandingkan dengan teori yang lainnya. Teori Keynes berpendapat bahwa jumlah investasi tidak bergantung pada pengembalian akan tetapi dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat suku bunga dan inflasi, jadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja melainkan beberapa variabel yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi. Pada teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro yang mempengaruhi perilaku individu berbeda dengan teori ekonomi klasik yang didasari dengan pengembangan keluaran potensial. Teori Keynes berkembang pada abad ke 20 yang didasari oleh ide ekonomi Inggris yang dimana pada saat itu teori ini menggambarkan perilaku masyarakat pada investasi serta dalam pertumbuhan ekonomi (Wulandari & Shodiq, 2023).

Pemahaman mengenai investasi, baik dalam konteks ekonomi maju maupun berkembang, didukung oleh teori yang berkembang dari pendekatan klasik hingga modern. Teori Investasi Keynes, yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes

dalam karyanya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936), menempatkan investasi sebagai penggerak utama permintaan agregat. Keynes berargumen bahwa keputusan investasi didasarkan pada perbandingan antara *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) yang merepresentasikan present value dari keuntungan yang diharapkan dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Investasi akan layak dilakukan hanya jika MEC lebih besar dari suku bunga. Dalam konteks negara berkembang, teori ini menyoroti kerentanan investasi terhadap ketidakpastian. Ekspektasi keuntungan (MEC) mudah runtuh akibat volatilitas ekonomi, ketidakstabilan politik, dan lemahnya penegakan hukum, sehingga meskipun suku bunga rendah, investasi dapat tetap stagnan (Caldara et al. 2020).

Todaro (2000) mengemukakan bahwa persyaratan umum pembangunan ekonomi ada 3 (tiga) yaitu: a) Akumulasi modal, termasuk akumulasi modal baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, b) perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya, c) kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari (Makmun & Yasin, 2003).

Investasi adalah pengorbanan sumber daya (waktu, uang, dan usaha) hari ini dengan harapan mendapatkan lebih banyak sumber daya dikemudian hari (Laopodis, 2021). Berdasarkan perspektif ini, investasi dapat dipahami sebagai pengorbanan yang saat ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau apresiasi melalui perolehan aset atau barang (Hayes, 2022). Nilai suatu aset cenderung

meningkat dari waktu ke waktu karena terapresiasi. Orang yang membeli barang sebagai investasi tidak melakukannya dengan maksud menggunakannya untuk konsumsi, melainkan untuk menghasilkan kekayaan di masa depan.

Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal dalam bentuk uang atau harta berharga lainnya pada suatu benda, lembaga atau badan dengan harapan penanam modal atau penanam modal akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Investasi ini disebut juga sebagai investasi karena mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Sebutan investasi bermula dari kata Italia *investire*, yang berarti “menggunakan”. Dana atau aset yang diinvestasikan oleh investor umumnya dikembangkan oleh lembaga atau badan yang mengelolanya. Keuntungan dari pengembangan akan dibagikan kepada investor sesuai kesepakatan para pihak (Savanah & Takarini 2021).

Menurut Krugman (2000) yang dimaksud dengan Foreign Direct Investment adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Lebih lanjut, menurut Kindleberger (dalam Krugman, 1969), pada dasarnya FDI lebih mengacu pada transfer kontrol daripada transfer modal. Teori The OLI Framework dikemukakan oleh John Dunning (1997, 1981, 1988) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori rancangan ektis (Rahajeng, 2016). Dalam rancangan teori ditetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan apabila sebuah perusahaan akan masuk dalam penanaman modal asing.

Menurut Hymer (1960), FDI merupakan hasil dari keputusan perusahaan multinasional untuk memperluas operasi bisnisnya ke luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan produksi serta menggaet pasar yang baru. Lebih lanjut, menurut Hymer, keputusan untuk melakukan penanaman modal tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan kontrol yang sekiranya bisa didapatkan oleh si investor. Selain itu, tingkat investasi bukan hanya dipengaruhi faktor kondisi pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi nonekonomi seperti politik serta regulasi di negara yang akan diberikan modal.

Beberapa asumsi yang melandasi teori tersebut, antara lain: (1). Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. (2). Dalam perekonomian dua sektor (Rumah tangga konsumen dan produsen) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. (3). Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (0). (4). Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal dan output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio = ICOR*) (Arsyad, 2004).

Foreign Direct Investment (FDI) adalah investasi asing langsung yang di dalamnya terdapat investasi aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, dan pengadaan barang modal, dan memenuhi faktor pendukung produksi. Kompensasi merupakan hal yang diterima seorang investor untuk masa yang akan

datang dengan tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan tiba. Sebagai asumsi dari investor tidak mengambil dananya sebelum habisnya masa periode investasi berakhir, maka besarnya penerimaan tersebut sebagai fungsi dari jangka waktu komitmen investo, tingkat inflasi, serta ketidakpastian atas penerimaan di masa nanti. Semakin lama periode yang diambil oleh investor maka akan semakin besar kompensasi yang diterima oleh investor. Peningkatan inflasi dan ketidakpastian lingkungan bisnis mendorong pemberian kompensasi yang lebih besar, sejalan dengan besarnya risiko yang ditanggung investori (Nuzula & Nurlaily 2020).

Foreign Direct Investment atau dapat dalam bahasa Indonesia adalah investasi asing langsung atau dapat juga disebut sebagai penanaman modal asing (PMA) adalah suatu metode investasi yang dilakukan oleh investor dari luar negeri (asing), dimana perusahaan asing tersebut mendirikan atau memperluas kehadirannya di negara lain melalui berbagai kegiatan bisnis. FDI dapat berkembang karena adanya kekurangan pasar dan kekurangan produk pada dalam negeri, yang mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan kegiatan produksi dan operasional mereka secara efisien.

Foreign Direct Investment mengacu pada alokasi modal untuk tujuan memulai proyek atau memberikan bantuan keuangan untuk menghasilkan output, seperti membeli bahan mentah atau mendirikan sektor bisnis, dengan tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi. Foreign Direct Investment sering kali menargetkan negara-negara dengan stabilitas keuangan yang kuat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kerugian ekonomi yang kecil. Jika ekonomi suatu

negara dalam keadaan genting dan memiliki utang luar negeri yang besar, investor asing cenderung ragu-ragu sebelum melakukan investasi di negara tersebut (Irfan & Aimon 2020).

Foreign Direct Investment (FDI) adalah investasi asing langsung yang di dalamnya terdapat investasi aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, dan pengadaan barang modal, dan memenuhi faktor pendukung produksi. Kompensasi merupakan hal yang diterima seorang investor untuk masa yang akan datang dengan tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan tiba. Sebagai asumsi dari investor tidak mengambil dananya sebelum habisnya masa periode investasi berakhir, maka besarnya penerimaan tersebut sebagai fungsi dari jangka waktu komitmen investo, tingkat inflasi, serta ketidakpastian atas penerimaan di masa nanti. Semakin lama periode yang diambil oleh investor maka akan semakin besar kompensasi yang diterima oleh investor. Peningkatan inflasi dan ketidakpastian lingkungan bisnis mendorong pemberian kompensasi yang lebih besar, sejalan dengan besarnya risiko yang ditanggung investori (Nuzula & Nurlaily 2020).

2.1.2. Suku Bunga

Teori Keynes (John Maynard Keynes,1936) menyebutkan bahwa, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, menurut teori ini ada tigamotif, mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai,yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan uang yang diberi istilah Liquidity preference, adanya permintaan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa

umumnya orang menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut. Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi, dalam hal ini permintaan besar apabila tingkat bunga rendah dan permintaan kecil apabila bunga tinggi (Nguyen, 2020).

Menurut Wibowo (2019) tingkat Suku bunga merupakan cerminan dari biaya berinvestasi sehingga memiliki korelasi negatif terhadap penanaman modal asing di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang berarti semakin tinggi biaya investasi, maka semakin menurun tingkat investasi asing langsung di suatu negara tersebut. Alokasi modal dari swasta dilihat dari tingkat suku bunga perusahaan dengan peluang investasi yang mampu membayar imbalan tinggi atas modal yang ditanamkan oleh para investor.

Suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang memberi keuntungan kepada para pengusaha. Pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanam modal apabila tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu persentase keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar, lebih besar dari bunga. Alokasi modal dari perusahaan dilihat dari suku bunga perusahaan dengan peluang investasi menguntungkan serta mampu membayar imbalan tinggi atas modal, sehingga akan menarik modal dari perusahaan yang tidak efisien.

Menurut Mankiw (2019) suku bunga dikelompokkan menjadi dua yaitu suku bunga nominal, merupakan harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan

serta merupakan variabel paling penting diantara variabel-variabel makro ekonomi dan suku bunga riil, yaitu suku bunga yang menyesuaikan suku bunga nominal terhadap dampak inflasi dengan tujuan agar diketahui seberapa cepat daya beli rekening seseorang akan naik sepanjang waktu. Suku bunga riil adalah suku bunga nominal dikurangi laju inflasi (Ardikaningtyas, 2023).

Pengertian tingkat suku bunga pembayaran atas modal yang dipinjam oleh pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai presentase dari modal dinamakan tingkat suku bunga. Berarti tingkat suku bunga adalah presentase pembayaran modal yang dipinjam dari lain pihak. Bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku bunga adalah harga yang dibayar untuk meminjam uang, diukur dalam dollar per tahun yang dibayar per dollar yang dipinjam atau dalam % per tahun (Sukirno, 2016).

Menurut Mankiw (2019) membedakan suku bunga menjadi dua, yaitu ;

1. Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati pasar.
2. Suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya, suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi merupakan bagian dari pendapatan dalam suatu perekonomian. Perekonomian dapat tetap tumbuh harus ada investasi. Investasi merupakan tambahan bersih dalam persediaan modal atau dapat menginvestasikan bagian tertentu dari GDP. Investasi merupakan tambahan bersih dalam persediaan modal. Semakin investasi meningkat

dan semakin banyak maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat dengan laju pertumbuhan yang cepat. GDP merupakan nilai total produksi dari barang dan jasa suatu negara yang produksinya terjadi dalam kurun waktu tertentu. GDP memfokuskan pada jumlah pengeluaran (Mankiw, 2019)

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. Kuznets (1971) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang ekonomi kepada penduduknya, yang ditentukan oleh kemajuan teknologi, institusi, serta penyesuaian ideologis terhadap kebutuhan tersebut.”

GDP merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, GDP mengukur pendapatan total masyarakat dan total belanja pemerintah untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. GDP dapat mengukur pendapatan total masyarakat dan pengeluaran belanja pemerintah karena keduanya adalah sama. Dalam suatu perekonomian harus ada keseimbangan antara total pendapatan dan pengeluaran (Mankiw, 2019).

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan langkah meningkatkan output perkapita yang berjangka panjang. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dari indikator pertumbuhan GDP (Prasetyo *et al.* 2011). Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan karena adanya peningkatan barang dan jasa yang di produksi oleh suatu negara. Maka untuk menentukan tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu negara maka perlu menghitung pendapatan nasional riil yaitu GDP Riil (Anggie *et al.* 2017).

Todaro & Smith (2015) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting pembangunan, yang diukur melalui peningkatan pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan output, tetapi juga menjadi prasyarat bagi peningkatan standar hidup masyarakat.

Jhingan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana output riil per kapita meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Proses tersebut memerlukan akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, serta kemajuan teknologi sebagai faktor kunci. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil interaksi antara faktor kuantitatif (modal, tenaga kerja, sumber daya alam) dan faktor kualitatif (teknologi, kelembagaan, serta kebijakan pemerintah). Konsep ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata peningkatan angka PDB, tetapi juga melibatkan transformasi struktural dan peningkatan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan GDP yang mengacu pada peningkatan pendapatan nasional. GDP dapat diukur melalui tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan produksi, pendekatan kedua adalah pendekatan pendapatan, dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan merupakan pendekatan dari sisi penawaran agregat, dan pendekatan pengeluaran merupakan perhitungan dari GDP dari sisi permintaan agregat. Berdasarkan pendekatan

produksi, GDP merupakan jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi dan menurut pendekatan pendapatan, GDP merupakan jumlah perolehan masuk yang diterima dari faktor-faktor produksi dalam proses produksi masing-masing sektor. Menurut pendekatan pengeluaran, GDP merupakan total dari semua elemen dari permintaan yang berupa pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mengarah pada keuntungan (C), membentuk modal tetap domestik bruto, dan perubahan stok (I), Pengeluaran konsumsi pemerintah (G), Ekspor (X) dan Impor (Tambunan, 2014).

2.1.5 Korupsi

Teori yang menjelaskan tentang penyebab korupsi diperkenalkan oleh Jack Bologne (1993) dalam teori GONE, menurutnya penyebab korupsi yang melanggar nilai integritas disebabkan oleh GONE yang merupakan singkatan dari G (greed), O (opportunity), N (needs) dan E (Exposes) dalam arti korupsi terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan (Ismatullah & Eriswanto, 2016). Keserakahan berkaitan dengan adanya potensi perilaku serakah yang dimiliki oleh setiap orang, hal ini berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Kesempatan terbuka akibat dari keadaan tertentu suatu Organisasi, instansi, atau masyarakat luas sehingga membuka faktor kesempatan tersebut bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Adapun faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Sedangkan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan tersebut (Hartina, 2023).

Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sosial dan ekonomi di suatu negara. World Bank memperkirakan bahwa lebih dari satu triliun USD dihabiskan untuk kegiatan suap setiap tahunnya dan negara yang mampu mengatasi korupsi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan pendapatan per kapita lebih besar. Menurut Klitgaard (1988), korupsi dapat menimbulkan kemiskinan karena semua keputusan dalam pengeluaran anggaran publik bergantung pada keuntungan pribadi serta adanya uang suap dari perusahaan yang melakukan kegiatan industri tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Adanya korupsi menandakan bahwa kualitas pemerintah suatu negara buruk. Pemerintah yang memiliki kualitas yang buruk bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi (Méon & Sekkat 2008)

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi (Setiadi 2018).

Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*), korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Menurut *World Bank*, korupsi didefinisikan “*the abuse of public power for private benefit*”, penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi diartikan bukan hanya kepada seseorang, tetapi juga kepada suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga (World Bank, 2009).

Definisi di atas juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum (Kurniasih et al. 2014).

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Bentuk dan motif korupsi dapat berbeda-beda, yaitu dijelaskan sebagai

berikut (Stückelberger 2010):

- a. Korupsi kemiskinan (*corruption of poverty*), umumnya disebut korupsi kecil (*petty corruption*), yaitu berakar dalam kemiskinan. Sebagai contoh jika pegawai-pegawai pemerintah tidak menerima gaji atau gajinya tidak mencukupi untuk kehidupan.
- b. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*), umumnya disebut korupsi besar (*grand corruption*), yaitu berakar dari adanya nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
- c. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi untuk mempercepat urusan (*corruption of acceleration*), dimaksudkan untuk mendapat barang atau pelayanan yang jika tanpa korupsi tidak bisa diperoleh atau tidak tepat waktu atau hanya dengan biaya administratif yang lebih besar.

Menurut Aditjondro (2003) secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Lapis Pertama Penyuapan (*bribery*), yaitu di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*) di mana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.
- b. Korupsi Lapis Kedua Jejaring korupsi (*cabal*) antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis di antara beberapa anggota jejaring korupsi

yang dapat berlingkup nasional.

- c. Korupsi Lapis Ketiga Jejaring korupsi (*cabal*) berlingkup internasional, di mana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga- lembaga pengutang dan atau lembaga internasional yang punya otoritas dibidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Korupsi cenderung mengalihkan pengeluaran pemerintah dari wilayah sosial menuju pembangunan proyek yang tidak dibutuhkan atau investasi dengan kualitas yang lebih rendah di bidang infrastruktur. Di negara-negara yang paling korup, politisi korup cenderung memilih proyek investasi bukan berdasarkan basis ekonomi intrinsik mereka, namun pada kesempatan untuk suap dan suap proyek ini hadir. Korupsi dapat mempengaruhi pembentukan modal manusia, yang merupakan *input* terpenting dalam proses produksi dan transformasi yang disebut pembangunan ekonomi (Aditjondro, 2003).

Beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Means – Ends Scheme Robert, teori ini dikemukakan oleh Robert Merton yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.
- b. Teori Vroom, teori ini dikemukakan oleh Victor H, Vroom yang menyatakan bahwa korupsi merupakan nilai negatif dari harapan seseorang untuk

mencapai sesuatu. Teori ini memandang bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh harapan dan nilai yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang.

- c. Teori Robert Klitgaard, teori ini menyatakan bahwa monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi. Teori Gane, teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Ilustrasi teori ini terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi keserakahan (*greeds*), kesempatan (*opportunities*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*exposure*).

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Antar Suku Bunga Terhadap *Foreign Direct Investment*

Teori Keynes menyebutkan bahwa, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Menurut teori ini ada tiga motif, mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan seimbang (artinya tidak ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi (Friedman, 2016).

Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar

dari tingkat bunga yang harus di bayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk penggunaan dana (cost of capital). Semakin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk favorable (asset yang diterima) yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha yang normal (Tuanakotta, 2013).

Alkautsar, (2021) menemukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di negara- negara ASEAN hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh. Pratiwi (2022) menemukan bahwa suku bunga riil terbukti secara signifikan berpengaruh negatif terhadap arus masuk FDI di negara ASEAN 5 hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar & Rudatin (2023) menemukan bahwa Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap FDI di Negara Kawasan ASEAN. Barorah *et.al* (2019) Menemukan bahwa Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing.

2.2.2. Hubungan Antar Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Foreign Direct Investment*

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang dinamis, tetapi juga menggambarkan iklim usaha yang kondusif, daya beli masyarakat yang kuat, serta potensi keuntungan yang lebih besar bagi pelaku usaha. Dalam konteks Foreign Direct Investment (FDI), negara dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil cenderung menjadi destinasi yang lebih menarik bagi investor asing, karena memberikan prospek pasar yang menjanjikan, tingkat pengembalian investasi yang

kompetitif, serta risiko kerugian yang relatif lebih rendah. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan multinasional untuk menanamkan modalnya dengan harapan memperoleh manfaat jangka panjang dari perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di negara tujuan (Ningsih, 2019).

Peningkatan PDB yang signifikan pada suatu negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, sehingga daya beli masyarakat meningkat, hal ini menandakan sinyal positif untuk meningkatkan pendapatan dan menarik investasi asing (Prabowo, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anwar, 2016) Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam pada tahun 2005-2012. Artinya setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Foreign Direct Investment.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kinanti, 2024) pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Foreign Direct Investment di 8 Negara ASEAN Tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi di 8 Negara ASEAN akan dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan FDI karena adanya stabilitas ekonomi.

Aspar *et al* (2020) menemukan bahwa GDP berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap FDI di Negara-negara ASEAN hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar & Rudatin (2023) Menemukan bahwa GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di kawasan negara ASEAN hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh. Melegy (2024) Hasil

penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto riil memiliki dampak positif dalam merangsang investasi swasta di Mesir.

2.2.3. Hubungan Antar Variabel Korupsi Terhadap Foreign Direct Investment

Korupsi dapat menyebabkan penghindaran terhadap pajak, administrasi pajak yang lemah dan pemberian hak istimewa (*privilise*) yang cenderung berlebih terhadap kelompok masyarakat makmur yang memiliki akses kepada kekuasaan sehingga yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Pada umumnya negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi maka angka kemiskinannya juga cenderung tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah (Gumala & Anis 2019).

Wilantari *et al.*, (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang CPI memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap FDI di tiga negara ASEAN hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkautsar, (2021) Menemukan bahwa korupsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di 5 negara ASEAN. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asbullah *et al.* 2022) menemukan bahwa indeks persepsi korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap FDI. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan. (Jetin *et.al*, 2024) menemukan bahwa CPI tidak berpengaruh terhadap FDI. Selain berbagai penelitian tersebut, teori *grabbing hand* dan teori *helping hand* menjelaskan bahwa CPI atau korupsi bisa saja menjadi penghambat maupun penolong bagi investor untuk berinvestasi.

2.3. Studi Empiris

Barorah *et al* (2019) Meneliti tentang determinan Foreign Direct Investment (FDI) pada beberapa negara selama periode 2000–2017 dengan menggunakan

variabel Produk Domestik Bruto (PDB), keterbukaan perdagangan, suku bunga, dan inflasi, analisis yang di gunakan adalah regresi linear berganda dengan metode data panel menggunakan software evIEWS 9 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB dan keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap FDI, yang mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perekonomian dan semakin terbuka perdagangan suatu negara, semakin tinggi daya tariknya bagi investor asing. Sebaliknya, suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, menandakan bahwa tingginya biaya modal dan ketidakstabilan harga dapat menghambat arus masuk investasi asing. Temuan ini relevan dengan kondisi saat ini karena mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi, integrasi perdagangan, dan stabilitas makroekonomi merupakan faktor penting yang perlu dijaga negara-negara, termasuk ASEAN-5, untuk meningkatkan daya saing dalam menarik FDI di tengah persaingan global.

Aspar *et al* (2020) meneliti tentang determinan Foreign Direct Investment (FDI) di negara-negara ASEAN dengan menggunakan data selama periode penelitian yang mencakup variabel ukuran pasar (GDP), nilai tukar, nilai impor, dan suku bunga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan data time series tahunan dari tahun 2013-2017. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi Eviews. Hasil penelitian impor dan suku bunga berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment. Sementara variabel ukuran pasar (GDP) dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap FDI. Temuan ini relevan dengan kondisi saat ini karena menegaskan bahwa selain faktor fundamental seperti ukuran pasar, faktor perdagangan internasional dan kebijakan moneter terutama suku bunga memiliki peran penting dalam menarik investor asing di negara-negara ASEAN,

sehingga stabilitas nilai tukar dan kebijakan impor yang tepat dapat menjadi strategi mendukung peningkatan FDI.

Sergeeva, *et al* (2022) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak dari sumber-sumber investasi seperti investasi publik, investasi swasta, dan investasi asing langsung investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel yang digunakan adalah Tenaga kerja, keterbukaan perdagangan, investasi swasta, investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tenaga kerja dan keterbukaan perdagangan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi swasta dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi publik berpengaruh tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi swasta domestik, investasi asing langsung, keterbukaan perdagangan dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pratiwi (2022) Meneliti tentang Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung Di Asean periode 2007 hingga 2018. Penelitian ini difokuskan pada enam anggota ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam, Filipina, dan Vietnam. Variabel yang digunakan adalah ukuran pasar, nilai tukar, keterbukaan perdagangan, stabilitas politik dan suku bunga riil dengan menggunakan analisis data panel dengan model common effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pasar, nilai tukar, keterbukaan perdagangan, dan stabilitas politik berpengaruh terhadap arus masuk FDI di ASEAN. Selain itu, suku bunga riil terbukti secara signifikan berpengaruh negatif terhadap arus masuk PMA.

Asbullah *et al.* (2022) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini FDI, Infrastruktur, keterbukaan perdagangan, Inflasi, Korupsi, dan ukuran pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh terhadap FDI. Penelitian ini juga dapat menyimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan dapat menyebabkan FDI meningkat. Inflasi, korupsi dan ukuran pasar berpengaruh terhadap FDI.

Imran & Rashid (2023) Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis komparatif tentang faktor-faktor yang memengaruhi sepuluh negara penerima manfaat terbesar PMA di Afrika. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan infrastruktur, tabungan domestik yang rendah, dan inflasi harga merupakan beberapa faktor penghambat masuknya PMA di Afrika. Selain itu, penelitian ini juga menemukan tata kelola pemerintahan yang buruk, yang dapat menghambat pertumbuhan lembaga-lembaga yang efektif dan arus masuk modal. Sangat penting bagi negara-negara ini untuk mengambil kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah-masalah ini, menarik investasi swasta yang memungkinkan aktivitas ekonomi yang signifikan, dan meningkatkan kemakmuran ekonomi mereka.

Fajar & Rudatin (2023) Meneliti tentang Analisis determinan aliran Foreign Direct Investment (FDI) di kawasan ASEAN, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Inflasi, suku bunga, IPM, PDB dan keterbukaan perdagangan. Penelitian ini menggunakan data panel periode 2010-2019 dan 7 negara di ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan inflasi, suku bunga, dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap FDI di Negara Kawasan ASEAN, sementara Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap FDI dan variabel Keterbukaan Perdagangan tidak berpengaruh terhadap FDI di Negara Kawasan ASEAN.

Imran & Rashid (2023) Penelitian ini mengidentifikasi episode-episode aliran investasi asing langsung bruto (FDI). Variabel yang digunakan dalam penelien ini adalah WUI, PDB dan Inflasi. Pendekatan panel regresi log-log komplementer (Clog-log) dan probit untuk 50 negara berkembang selama periode 1990-2018. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa Indeks ketidakpastian dunia (WUI) tidak berpengaruh terhadap arus masuk FDI di negara-negara berkembang. penelitian ini menemukan bahwa PDB berpengaruh terhadap FDI sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap FDI di Negara-negara berkembang.

Liu *et al.* (2023) Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penentu OFDI Tiongkok dalam jangka pendek dan jangka panjang, dengan fokus pada 138 negara yang menjadi bagian Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OFDI Cina baik di negara pesisir maupun negara yang terkurung daratan secara statistik sensitif terhadap variabel ekonomi, energi, logistik, dan politik di negara-negara yang terlibat dalam BRI. Hal ini juga juga menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur logistik dan lingkungan investasi politik di negara-negara yang terkurung daratan dapat secara positif menarik OFDI China.

An & Yeh (2023) Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor penentu ekonomi dan kelembagaan dari investasi langsung ke luar negeri Taiwan. di enam negara Asia Tenggara dari tahun 1998 sampai 2017, dengan menggunakan estimasi panel ARDL-Pooled Mean Group. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan berpengaruh terhadap investasi langsung ke luar negeri Taiwan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor ekonomi lokal merupakan faktor penentu utama dalam jangka panjang. Hubungan perdagangan yang erat dan bersejarah dengan Asia

Tenggara berpengaruh dalam jangka panjang. Sebaliknya, kualitas kelembagaan negara tuan rumah memiliki efek positif yang kuat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Melegy (2024) Penelitian ini menyelidiki faktor penentu investasi swasta di Mesir dari tahun 1982 hingga 2021 variabel yang digunakan dalam penelitian ini PDB Ril, Nilai tukar Ril dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto riil berpengaruh terhadap investasi swasta di Mesir. sementara nilai tukar riil dan inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi swasta.

Rahman (2024) Penelitian ini mengkaji risiko yang dihadapi investor asing dalam menjalankan bisnis di negara berkembang, terutama yang berkaitan dengan investor Jepang. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Globalisasi Ekonomi; Ekonomi Politik; Penanaman Modal Asing FDI; Penanaman Modal Asing Swasta PFI; Bilateral Perjanjian Investasi BIT; Risiko Investasi; Negara Berkembang; Negara Kurang Berkembang LDC; Manajemen Risiko. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan global untuk perdagangan dan investasi perlu ditingkatkan dan dapat bekerja lebih baik dalam mendukung bidang perdagangan dan industri, ekonomi global, terutama untuk mendorong proteksionisme dan investment.

Bhutto *et al* (2024) Analisis Investasi Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi di Tiga Sektor Utama Pakistan. Variabel yang digunakan adalah Model Vector Autoregressive (VAR); Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi; Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap investasi swasta. Data estimasi VAR menunjukkan bahwa sektor jasa dan sektor manufaktur berpengaruh terhadap investasi swasta.

Bhujabal *et al* (2024) Penelitian ini menyelidiki dampak kualitas kelembagaan terhadap tingkat arus masuk PMA di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara selama periode 2002-2019. Variabel yang digunakan indeks kualitas kelembagaan, PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kualitas kelembagaan berpengaruh terhadap arus masuk PMA di kedua regional. Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis/PCA) pada enam indikator tata kelola. Iterated generalized least squares (I-GLS) dalam model efek tetap telah digunakan untuk estimasi hasil. Hal ini mengimplikasikan bahwa sistem tata kelola yang terdiri dari rendahnya korupsi, stabilitas politik, tidak adanya kekerasan, suara dan akuntabilitas, kualitas peraturan dan sistem peradilan yang tepat membantu menarik arus masuk FDI di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. PDB berpengaruh terhadap arus masuk PMA di Asia Selatan dan Asia Tenggara.